

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Indonesia National Single Window (INSW) merupakan sistem pelayanan elektronik terintegrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan ekspor dan impor, dengan mengintegrasikan pelayanan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Namun, implementasi INSW masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti gangguan teknis sistem, ketidaksinkronan data antar instansi, keterlambatan verifikasi, dan kurangnya pemahaman eksportir terhadap tata cara penggunaan sistem. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat terhambatnya proses perizinan. Mekanisme pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) yang mengharuskan pengajuan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui SINSW sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yang mengharuskan setiap pengajuan dokumen kegiatan ekspor, harus melalui SINSW dan setiap kegiatan ekspor dan impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penggunaan INSW. Namun dalam praktiknya, kendala teknis dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal kerap menghambat proses perizinan melalui INSW, menyebabkan terhambatnya kegiatan ekspor dan berdampak pada bertambahnya biaya penyimpanan produk yang harus ditanggung eksportir. Adanya mekanisme pengajuan izin kepada Menteri secara manual ketika SINSW

bermasalah, penerbitannya memiliki jangka waktu 15 hari, sebagai solusi darurat justru menimbulkan tambahan beban biaya dan risiko tanggung jawab antara eksportir dan importir, yang dimana eksportir akan terbebani biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan keandalan sistem INSW sekaligus pengaturan perlindungan hukum yang jelas bagi pelaku usaha agar risiko kerugian akibat gangguan sistem dapat diminimalisir, sehingga tercipta ekosistem perdagangan ekspor-impor yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

Saran

Untuk mengatasi persoalan dalam sistem INSW, pemerintah disarankan perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna memastikan stabilitas dan keandalan sistem sebagaimana mandat dalam Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 44 Tahun 2018. Sinkronisasi antar sistem kementerian dan lembaga harus diperkuat agar tidak terjadi benturan prosedur dan duplikasi dokumen, sesuai prinsip integrasi sistem yang tertera dalam Pasal 3 Perpres tersebut. Pemerintah juga disarankan menyusun regulasi teknis tambahan yang mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat gangguan atau kesalahan sistem INSW. Selain itu, penyelenggara INSW wajib menyediakan saluran pengaduan yang terbuka dan cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terakhir, edukasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada pelaku kegiatan ekspor impor sangat diperlukan agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan sistem INSW serta terhindar dari potensi kerugian administratif akibat kesalahan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. Dasar-dasar Ekspor Impor: Teori Praktik dan Prosedur. Cetakan 1. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ali Zainal, 2019, Hukum Administrasi Perizinan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2020. Hukum Perdagangan Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Baisa, Ibrahim Khozi dkk. 2021. Connecting Change: Sejarah Perjalanan INSW. Cetakan 1. Lembaga National Single Window, Jakarta.
- Barizah Nurul dan Redi Ahmad. 2020. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ifat Fauziah. 2018. Buku Panduan Export & Import. Cetakan 1. Ilmu Cemerlang Group, Pamulang.
- Intan Inayatun Soeparna. 2020. Hukum Perdagangan Internasional dalam World Trade Organization. Cetakan 1. Airlangga University Press, Surabaya.
- Johan Nasution. 2020. Hukum Kontrak Internasional: Prinsip dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Maria Farida Indrati. 2018. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mey Risa, 2020, Buku Ajar Ekspor dan Impor, cetakan pertama, Poliban Press, Banjarmasin
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady. 2021. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Teori, Praktik, dan Hukum Internasional. Kencana, Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2006. Pengantar Hukum Dagang. Cetakan ke-6. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Rina Anggraini. 2023. Efektifitas Indonesia National Single Window dalam mendukung peningkatan Ekspor pada sektor perikanan di Sumatra Selatan. Tesis. Universitas Sriwijaya.
- Sasono dan Herman Budi. 2013. Manajemen Impor dan Importasi Indonesia. Cetakan 1. Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2000/15. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 1. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhartono, Sulaeman, 2018, Hukum Kepabeanan dan Cukai di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2018. Aneka Perjanjian. Citra Umbara, Jakarta.
- Susanti Ratna dan Setiawan Bambang, 2020, Hukum Investasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama,

- Sudikno Mertokusomo. 2020. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Cetakan 1. CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Suharsyah. 2021, Hukum Kepabeanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 1. Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2019. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Winarno, 2019. *Hambatan Non-Tarif dalam Perdagangan Ekspor Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Usman Rachmadi. 2019. Hukum Perdagangan Internasional dan Regulasi Ekspor-Import. Jakarta: Kencana.
- Wieta B. Komalasari. 2023. Analisis Kinerja Perdagangan Karet. Cetakan 1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Winarno Bambang. 2016, Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. Cetakan 1. Sinar Grafika, Jakarta
- Sari Murti Widiyastuti. 2020. Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata. Cetakan 1. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tesis

- Amin Kuncoro Aji. 2024. Proses Pengurusan Dokumen Kapal MT Sinar Morotai Dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) di PT Samudera Energi Tangguh Cabang Banten. Tesis. PIP Semarang.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2018, Tinjauan Umum Terhadap Kontrak Arbitrase, UKSW
- Rina Anggraini, 2023, Efektifitas Indonesia National Single Window dalam mendukung peningkatan Ekspor pada sektor perikanan di Sumatra Selatan, Tesis, Universtias Sriwijaya.

Jurnal

- Endrik, 2018, "Perbedaan Pactum de Compromittendo dan Acta Compromis," Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, FH UI
- Fajar, Muhammad Ibnu dkk. 2017. "Implementasi Indonesia National Single Window (INSW): Suatu Pendekatan Business Intelligence System (BIS)." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 21, No. 1. Universitas Gadjah Mada.
- Hapsari, Karina Tri dkk. 2015. "Implementasi Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Sebagai Upaya Pendorong Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Import." Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 1, No. 1. Universitas Brawijaya.
- Imron Mustofa. 2016. "Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." EL-BANAT, Vol. XI, No. 2. Sekolah Tinggi Agama Islam

- Lexy W. Roring, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran," Lex Privatum, Vol. IX/No.-3/2021,Universita Sam Ratulangi
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." Jurnal Al-HUKAMA, Vol. 7, No. 1. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahayu. 2009. "Pengangkutan Orang: Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1. Universitas Diponegoro Press.
- Sari, Dewi. 2023. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem INSW." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. VII, No. 2. CV Litera Inti Aksara.
- Sulistianingsih dan Pujiono, 2023, "Keabsahan Perjanjian Arbitrase Asimetris Berdasarkan Hukum," Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, Vol. XIV/ No.-1/2023, Sebelas Maret Press,
- Sulistyowati dan Wiwik Widyati. 2015. "Implementasi Kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) Terhadap Kepuasan Eksportir Mebel Di Pelabuhan Tanjung Emas." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. III, No. 4. Universitas Diponegoro.
- Tjoanda, M. 2010. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal SASI, Vol. XVIV, No. 4. Universitas Pattimura.
- Teguh A. S. dan Suharyanto H., 2023, "Kebijakan Penerapan National Single Window Menuju Daya Saing Perdagangan Internasional Indonesia," Jurnal Policy, Vol XX/No.-2/2023, PPPM.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.012/2022 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Sumber Internet

- ASEAN, Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, hlm 1 <https://asean.org/wp-content/uploads/2020/12/Agreement-to-Establish-and-Implement-the-ASEAN-Single-Window-ASW-Agreement-1.pdf>, diakses 15 Juni 2025.
- DJKN. "Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>, diakses 11 Mei 2025.

hukumonline.com. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses 7 Mei 2025.

Hukumonline, “Force Majeure dalam Hukum Indonesia,” hlm.3, hukumonline.com, diakses 20 Juni 2025.

Hukumonline, “Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda,” hlm. 1, hukumonline.com, diakses 29 Juni 2025.

International Chamber of Commerce, “Using the Incoterms 2020 Rules to Manage Tariff Risk in International Trade,” hlm.5, iccwbo.org, diakses 20 Juni 2025.

International Trade Administration, “Know Your Incoterms,” hlm. 4, trade.gov, diakses 20 Juni 2025.

jdi.h.maritim.go.id. “Sistem Indonesia National Single Window.” <https://jdi.h.maritim.go.id/id/sistem-indonesia-national-single-window>, diakses 11 Mei 2025.

Kuehne dan Nagel, “Incoterms 2020 – Regulasi Perdagangan Internasional,” hlm. 6, id.kuehne-nagel.com, diakses 20 Juni 2025.

Lembaga National Single Window (LNSW). “Mengenal National Single Window.” <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/mengenal-national-single-window>, diakses 1 Juni 2025.

Lembaga National Single Window (LNSW). “Sejarah INSW.” <https://www.insw.go.id/sejarah>, diakses 15 Mei 2025.

Ombudsman Republik Indonesia. “Ombudsman Soroti Potensi Maladministrasi dalam Tata Kelola Ekspor Impor.” <https://suarapemerintah.id/2024/06/ombudsman-soroti-potensi-maladministrasi-dalam-tata-kelola-ekspor-impor/>, diakses 18 Januari 2025.

simplypsychology.org. “Heider’s Balance Theory in Psychology: Definition & Examples.” <https://www.simplypsychology.org/balance-theory.html>, diakses 7 Mei 2025.

SIP Law Firm. “Kenali Profil Lembaga Arbitrase di Indonesia.” <https://siplawfirm.com/profil-lembaga-arbitrase>, diakses 1 Juni 2025.

Trade Finance Global, “Delivered Duty Paid (DDP) Incoterms 2020 Rule,” hlm.2, tradefinanceglobal.com, diakses 20 Juni 2025.